



Media Title	Bisnis Indonesia		
Head Line	BPJT Tak Setuju Pelebaran Jalan		
Date	11 Maret 2014	Color	
Section	News	Circulation	
Page No	30	Article Size	
Journalist	Dimas Novita Sari	Advalue	
Frequency	Daily	PR Value	

► TOL CAWANG-PLUIT

BPJT Tak Setuju Pelebaran Jalan

JAKARTA—Badan Pengatur Jalan Tol cenderung tidak menyetujui usulan pelebaran jalan tol dalam Kota Jakarta yang dikelola PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk. (CMNP) dalam mengatasi kemacetan. Pasalnya, jika disetujui akan ada penambahan masa konsesi.

Dimas Novita Sari
dimas.novita@bisnis.co.id

Kepala BPJT Achmad Gani Ghazaly mengatakan dalam perjanjian pengusahaan jalan tol (PPJT) Cawang-Tanjung Priok-Jembatan Tiga/Pluit disebutkan masa konsesi akan berakhir 12 tahun lagi, atau tepatnya 31 Maret 2025.

"Kalau mereka jadi lebar, penambahan konsesi bisa sampai 10 tahun. Itu kan lama sekali [kembali ke pemerintah]," ujarnya Senin (10/3).

Sekretaris BPJT Arief Witjaksono menuturkan sesuai dengan peraturan yang ada, setelah masa konsesi jalan tol habis, maka pemerintah berhak mengambil alih jalan tersebut.

Namun, terdapat tiga opsi mengenai penanganan jalan tersebut. *Pertama*, dijadikan jalan nasional. *Kedua*, dilelang kembali, atau (*ketiga*) penunjukan BUMN sebagai operator jalan tol tersebut.

Jika jalan tol tersebut menjadi jalan nasional, maka pemerintah harus menanggung biaya pengoperasian dan perawatan jalan tersebut.

Terkait dengan pertimbangan penambahan masa konsesi yang begitu besar, Arif menjelaskan trafik jalan tol tersebut sangat gemuk, sehingga sebaiknya masa konsesi

► Memberikan izin berarti menambah masa konsesi 10 tahun.

► Biaya perawatan diklaim meningkat dua kali lipat.

yang ada dihabiskan terlebih dahulu dan membuka kesempatan yang lain untuk mengelola kalau nantinya pengoperasian ditender ulang.

"Tapi kita belum ada kecenderungan mau ke mana, tergantung pemerintahan nanti. Yang jelas, masa konsesi yang ada saat ini dihabiskan terlebih dahulu," ujarnya.

Kendati demikian, kata Gani, jika memang pelebaran merupakan satu-satunya solusi mengatasi kemacetan yang seringkali dikeluhkan pengguna jalan tol, maka otoritasnya kemungkinan akan memberikan izin.

Namun, dia menilai hal tersebut sebagai sesuatu yang luar biasa karena pelebaran tersebut akan menghabiskan dana Rp4 triliun. "Jika bisa ada opsi lain, tolong dicari opsi lain."

Berdasarkan PPJT, kompensasi komersial hanya berupa masa konsesi dan tarif. Dalam hal ini, kenaikan tarif tidak bisa diterapkan karena pengoperasian jalan tol dalam kota ini dilakukan bersama dengan PT Jasa Marga Tbk.

Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto menyatakan akan memberi izin kepada CMNP untuk melebarkan jalan tol dalam kota miliknya, sebagai solusi kemacetan yang kerap terjadi di ruas tersebut.

Pasalnya, berdasarkan beleid yang ada, rencana bisnis tersebut boleh saja dilakukan.

"Demi kelancaran, saya tidak mempersulit. Jadi kecenderungannya iya [beri izin]," katanya.

Apalagi, menurutnya, CMNP terbilang proaktif untuk mengatasi kemacetan lalu lintas di jalan tol



Sumber: Jasa Marga Tbk & CMNP

Bisnis/Ilham Nesabana

meskipun sebenarnya hal tersebut tidak diwajibkan.

Dihubungi terpisah, Direktur Keuangan sekaligus Sekretaris Perusahaan CMNP Indrawan Sumantri mengatakan perusahaan telah mengajukan usulan final terhadap rencana penambahan jalur tersebut.

Dia menilai dengan dilebarkannya ruas tersebut, maka dapat memecahkan permasalahan kepadatan di jalan tol dalam kota serta meningkatkan pelayanan kepada pengguna jalan.

Kemacetan itu, sambung Indrawan, menyebabkan biaya perawatan jalan tol tersebut meningkat dua kali lipat sejak 2 tahun terakhir karena jenis kendaraan yang lewat yakni kendaraan bertonase besar.

Tanpa merinci berapa kenaikan tersebut, Indrawan menuturkan keadaan tersebut sangat merugikan perusahaan.

BISA DIBICARAKAN

Mengenai penambahan masa konsesi yang dikhawatirkan pemerintah, Indrawan menyampaikan ada beberapa opsi yang bisa dibicarakan

dengan pemerintah mengenai kompensasi komersial tersebut.

Oleh karena itu, dia berharap BPJT memberikan izin terhadap usulan tersebut, sehingga konstruksi dapat segera dilakukan.

Perusahaan mengklaim telah mengkaji mengenai rencana tersebut dengan matang. Sebelumnya, manajemen CMNP akan melebarkan di sepanjang ruas, akan tetapi hal tersebut tidak memungkinkan.

Indrawan menyampaikan jika pelebaran dilakukan di jalan bebas hambatan sepanjang 32,96 km itu, maka akan menelan biaya hingga Rp12 triliun.

Dengan demikian, perusahaan hanya akan melakukan pelebaran di empat titik utama kemacetan dengan investasi Rp4 triliun.

Keempat titik tersebut yakni Cawang Junction, tikungan Tanjung Priok, Jembatan Tiga, dan Pluit.

Dalam rencana, pelebaran tersebut akan dilakukan di kedua sisi badan jalan, masing-masing 6 meter yang dibagi ke dalam dua lajur. ■